

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DI MASYARAKAT

Kudrotun Aini^{1*}, Milda Atia², Arindy Sri Musdalifah³, Istikamatul Amelia⁴

^{1,2}Hukum, Universitas Nurul Jadid

^{3,4}Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email corespondensi : Ainiainiaini@gmail.com ^{1*}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di sebuah negara. Meskipun banyak kebijakan yang telah diterapkan untuk memperkuat sistem hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum di masyarakat masih bervariasi. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana administrasi publik, melalui pendekatan preventif dan edukatif, dapat berperan dalam menciptakan kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pejabat administrasi publik, aparat penegak hukum, serta masyarakat, serta melalui diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi hukum dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh administrasi publik berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap informasi hukum. Di sisi lain, tantangan besar ditemukan pada ketimpangan pelayanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi dalam pelayanan publik dan pemberdayaan kebijakan lokal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang berpengaruh langsung pada tingkat kepatuhan hukum. Berdasarkan temuan ini, administrasi publik disarankan untuk memperluas program penyuluhan hukum, meningkatkan transparansi kebijakan, dan mendorong desentralisasi kebijakan untuk mencapai tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi di seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Administrasi Publik, Kepatuhan Hukum, Pendidikan Hukum, Transparansi, Desentralisasi Kebijakan, Program Penyuluhan Hukum, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Namun, meskipun negara memiliki berbagai peraturan hukum yang jelas dan terstruktur, tingkat kepatuhan terhadap hukum di masyarakat masih menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat.[1] Dalam hal ini, administrasi publik memainkan peran yang sangat penting. Administrasi publik adalah lembaga yang tidak hanya bertanggung jawab atas penerapan kebijakan hukum, tetapi juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara negara dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.[2]

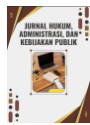
Administrasi publik berperan dalam memastikan bahwa kebijakan publik yang diterapkan dapat dipahami, diterima, dan diikuti oleh masyarakat. Namun, meskipun peran administrasi publik penting dalam mengelola layanan publik dan kebijakan yang berbasis pada hukum, implementasi kebijakan yang baik sering kali terhambat oleh beberapa kendala. Salah satu kendala utama adalah pengawasan yang kurang efektif, serta kurangnya upaya preventif dalam pendidikan dan penyuluhan hukum yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.[3]

Penelitian sebelumnya sebagian besar fokus pada aspek penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran hukum. Namun, penelitian yang secara khusus meneliti peran preventif administrasi publik dalam membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum melalui kebijakan yang inklusif dan edukatif masih sangat terbatas. Dalam hal ini, administrasi publik seharusnya tidak hanya bertugas dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang dapat membangun budaya hukum yang lebih baik di masyarakat.

Meskipun banyak penelitian yang membahas peran administrasi publik dalam penegakan hukum, sebagian besar studi tersebut lebih memfokuskan pada pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Gap utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perhatian terhadap peran preventif administrasi publik dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan yang lebih inklusif, transparan, dan edukatif. Sebagian besar studi lebih menekankan pada penegakan hukum secara reaktif, sedangkan peran administrasi publik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan hukum melalui kebijakan yang memprioritaskan pendidikan hukum dan pelayanan publik yang adil masih belum banyak diteliti.[4]

Selain itu, kinerja administrasi publik dalam menyediakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan instansi pemerintah, juga masih jarang menjadi fokus utama dalam literatur yang ada.

Penelitian ini menawarkan beberapa novelty yang bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dalam literatur sebelumnya, sebagai berikut:[5]



1. Pendekatan Preventif Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana administrasi publik dapat berperan dalam menciptakan budaya hukum yang baik dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dengan pendekatan preventif, yaitu melalui edukasi hukum di masyarakat, kampanye kepatuhan hukum, dan penyuluhan hukum yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap hukum.
2. Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana kinerja administrasi publik dalam mengelola kebijakan publik dan pelayanan publik yang transparan serta adil dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kepercayaan ini berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
3. Evaluasi Program Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Penelitian ini juga akan mengevaluasi berbagai program administrasi publik yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan hukum, seperti program penyuluhan hukum berbasis masyarakat, serta pelatihan-pelatihan hukum yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
4. Pengaruh Kebijakan Lokal dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum di Masyarakat Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan administrasi publik yang diterapkan di tingkat lokal atau daerah dapat lebih efektif dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum secara lebih langsung.

Tabel: Gap dan Novelty dalam Penelitian

Aspek Penelitian	Gap dalam Penelitian Sebelumnya	Novelty dalam Penelitian Ini
Pendekatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum	Penelitian sebelumnya lebih fokus pada penegakan hukum dan pengawasan. Sedikit yang mengkaji pendekatan preventif dalam meningkatkan kepatuhan hukum.	Penelitian ini menekankan peran administrasi publik dalam membangun kesadaran hukum melalui edukasi, kampanye, dan penyuluhan hukum yang bertujuan mencegah pelanggaran hukum.
Peran Administrasi Publik dalam Kepatuhan Hukum	Peran administrasi publik lebih dipahami sebagai penegak hukum, tanpa melihat fungsi pendidikan dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.	Penelitian ini mengkaji kinerja administrasi publik dalam menciptakan iklim hukum yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang adil.
Pengaruh Program Administrasi Publik dalam Kepatuhan	Kurangnya evaluasi terhadap program-program edukasi hukum yang dilakukan oleh administrasi publik untuk meningkatkan kepatuhan hukum.	Penelitian ini akan mengevaluasi berbagai program edukasi hukum dan kampanye kepatuhan hukum yang diinisiasi oleh administrasi publik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Kebijakan Daerah dan Kepatuhan Hukum	Penelitian terbatas pada kebijakan nasional atau sentral, dengan sedikit yang menilai kebijakan daerah dalam meningkatkan kepatuhan hukum.	Penelitian ini juga akan meneliti peran kebijakan administrasi publik lokal dalam meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun administrasi publik memainkan peran penting dalam penegakan hukum, ada gap penelitian yang menunjukkan keterbatasan dalam memahami peran preventif administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat.[6] Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti pendekatan edukatif dan inklusif administrasi publik dalam menciptakan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang lebih baik. Fokus pada evaluasi program-program publik, transparansi pelayanan, dan peran kebijakan daerah akan menjadi kontribusi utama penelitian ini terhadap pengembangan teori dan praktik administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran Administrasi Publik dalam Penegakan Hukum

Administrasi publik memiliki peran penting dalam pengelolaan kebijakan publik, salah satunya adalah kebijakan hukum yang bertujuan menciptakan masyarakat yang taat hukum. Fitzgerald dalam bukunya "Education Policy and the Role of Law" menjelaskan bahwa administrasi publik harus mampu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum. Penegakan hukum bukan hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga mencakup upaya preventif yang dapat membangun kesadaran hukum masyarakat.[7]

Dalam penelitian oleh Hood dijelaskan bahwa administrasi publik diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat membangun budaya hukum di masyarakat.[8] Sebagai contoh, kampanye kepatuhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan hukum yang ada.



2. Kepatuhan Hukum di Masyarakat

Kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman hukum, tingkat kesadaran sosial, dan hubungan antara individu dengan negara. Tyler dalam bukunya "Why People Obey the Law" berpendapat bahwa individu lebih cenderung mematuhi hukum jika mereka merasa bahwa hukum tersebut dibuat dengan adil dan diterapkan secara konsisten. Menurut Tyler, salah satu kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan hukum adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bertanggung jawab, termasuk administrasi publik.[9]

Sebagai tambahan, Rawls dalam karya klasiknya "A Theory of Justice" menyatakan bahwa keadilan dalam penerapan hukum akan menciptakan rasa kepercayaan di masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.[10] Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh administrasi publik harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan agar dapat membangun kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

3. Pendekatan Preventif dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Pendekatan preventif dalam administrasi publik berfokus pada upaya untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi, bukan hanya mengandalkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Lawson mengemukakan bahwa pendekatan preventif dalam administrasi publik bisa dilakukan dengan edukasi hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkenalkan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.[11] Kampanye kepatuhan hukum, pelatihan untuk aparat pemerintah, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum merupakan bagian dari pendekatan preventif ini.

Menurut Muluk dalam konteks negara berkembang, pendekatan preventif sangat penting untuk membangun budaya hukum yang sehat.[12] Hal ini mencakup integrasi pendidikan hukum dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, serta pembentukan masyarakat yang secara sukarela memahami dan mengindahkan hukum tanpa menunggu penegakan hukum yang keras.

4. Transparansi Administrasi Publik dan Kepatuhan Hukum

Transparansi dalam administrasi publik adalah salah satu aspek yang dapat meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Jones dalam bukunya "Public Administration and Policy Analysis" mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa bahwa kebijakan yang diterapkan oleh administrasi publik bersifat adil dan transparan.[13] Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut tidak memihak dan diterapkan secara konsisten, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum.

Penelitian oleh Van Klink dan de Lange menunjukkan bahwa kebijakan yang transparan dan akuntabel oleh administrasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan mereka terhadap hukum tersebut. Transparansi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik adalah hal yang krusial dalam mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.[14]

5. Peran Kebijakan Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Suryadi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kebijakan di tingkat lokal memiliki pengaruh yang lebih langsung dalam membentuk perilaku kepatuhan hukum masyarakat. Pemerintah daerah lebih memahami dinamika sosial dan budaya lokal, sehingga mereka dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mardiasmo menambahkan bahwa kebijakan daerah yang berbasis pada karakteristik masyarakat setempat dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.[15] Oleh karena itu, administrasi publik di tingkat lokal harus diberikan lebih banyak kewenangan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kepatuhan hukum di masyarakat.

6. Evaluasi Program Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Evaluasi terhadap berbagai program administrasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuannya. Fitzgerald menyatakan bahwa evaluasi terhadap kebijakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan hukum, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang ada.

Melalui evaluasi, administrasi publik dapat mengetahui program atau kebijakan mana yang efektif, dan mana yang perlu diperbaiki atau dihentikan. Oleh karena itu, evaluasi program administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan implementasi kebijakan hukum.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan upaya preventif yang mencakup pendidikan hukum, kampanye kesadaran hukum, serta transparansi dalam pelayanan publik. Kebijakan yang bersifat adil, transparan, dan inklusif akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadapnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran preventif administrasi publik dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, serta menilai efektivitas program-program administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum.



METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, baik dari sisi kebijakan, implementasi, maupun persepsi masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif subjektif, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh informan terkait peran administrasi publik dalam membangun kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran administrasi publik dalam konteks kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, sedangkan analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan administrasi publik dalam menciptakan kepatuhan hukum melalui pendekatan preventif dan pelayanan publik yang efektif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota-kota besar dan daerah terpencil yang memiliki perbedaan dalam hal akses terhadap layanan publik dan penegakan hukum. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum berdasarkan konteks lokal. Kota-kota besar akan mewakili daerah dengan akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik, sedangkan daerah terpencil akan memberikan perspektif terkait tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer: Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dengan informan yang relevan.
 - a) Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan pejabat administrasi publik, seperti pejabat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tenaga pendidik yang terlibat dalam program-program yang bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi mereka mengenai peran administrasi publik dalam menciptakan kepatuhan hukum dan kendala yang dihadapi.
 - b) Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok terfokus akan dilakukan dengan kelompok masyarakat, seperti warga, pemuka agama, atau aktivis sosial untuk memahami pandangan mereka mengenai kebijakan yang diterapkan oleh administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum.
- b. Data Sekunder: Data sekunder akan diperoleh melalui analisis dokumen, laporan kebijakan, peraturan pemerintah, serta studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dokumen yang dianalisis akan mencakup:
 - a) Kebijakan dan Regulasi: Mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh administrasi publik terkait kepatuhan hukum, seperti program penyuluhan hukum, transparansi pelayanan publik, dan kebijakan lokal.
 - b) Laporan dan Evaluasi Program: Menganalisis laporan program administrasi publik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum, serta hasil evaluasi terhadap keberhasilan dan hambatan yang dihadapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

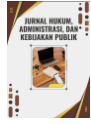
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang bersifat fleksibel untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari informan mengenai peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Panduan wawancara akan mencakup topik seperti program-program edukasi hukum, penegakan hukum, dan transparansi kebijakan.
- b. Focus Group Discussion (FGD): FGD akan dilakukan dengan kelompok yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat untuk menggali pendapat mereka mengenai pengaruh kebijakan publik terhadap kepatuhan hukum dan sejauh mana mereka merasa bahwa kebijakan yang ada berkeadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.
- c. Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan administrasi publik, seperti undang-undang, peraturan daerah, serta laporan tahunan pemerintah yang berkaitan dengan program kepatuhan hukum.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan studi dokumen akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Analisis Tematik: Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Analisis ini akan membantu peneliti untuk memahami pola-pola yang muncul terkait tantangan, kebijakan, dan keberhasilan program-program administrasi publik.



- b. Analisis Isi: Data sekunder yang berupa dokumen-dokumen kebijakan dan laporan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk memahami sejauh mana kebijakan administrasi publik yang ada telah efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat.
- c. Triangulasi Data: Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi data akan digunakan, yang berarti membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, FGD, dan studi dokumen) untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan.

7. Prosedur Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan:
 - a) Menyusun instrumen wawancara dan panduan FGD.
 - b) Menentukan lokasi penelitian dan informan yang akan diwawancarai serta peserta FGD.
 - c) Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan untuk analisis.
- b. Tahap Pengumpulan Data:
 - a) Melaksanakan wawancara mendalam dengan pejabat administrasi publik dan aparat penegak hukum.
 - b) Mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat setempat.
 - c) Mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan.
- c. Tahap Analisis Data:
 - a) Menganalisis data wawancara, FGD, dan dokumen dengan menggunakan teknik analisis tematik dan analisis isi.
 - b) Melakukan triangulasi data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.
- d. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian:
 - a) Menyusun laporan hasil penelitian yang mencakup temuan utama, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kepatuhan hukum di masyarakat melalui administrasi publik.

8. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan kualitas penelitian, beberapa langkah berikut akan dilakukan:

- a. Validitas Data: Menggunakan teknik triangulasi data untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, yang akan meningkatkan keandalan temuan penelitian.
- b. Reliabilitas: Instrumen wawancara dan FGD akan diuji coba terlebih dahulu pada kelompok kecil untuk memastikan bahwa instrumen tersebut dapat memperoleh data yang relevan dan bermanfaat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk menggali secara mendalam peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Melalui wawancara, FGD, dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pendekatan preventif, transparansi pelayanan, dan program edukasi hukum yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen kebijakan, ditemukan beberapa temuan utama yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.1. Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Administrasi publik memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, terutama melalui kebijakan yang mendukung pendidikan hukum dan pelayanan publik yang transparan. Hasil wawancara dengan pejabat pemerintah daerah menunjukkan bahwa program penyuluhan hukum dan kampanye kepatuhan hukum yang dilaksanakan oleh administrasi publik di beberapa daerah terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Namun, ada perbedaan dalam penerapan program ini di daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, di mana akses terhadap informasi dan fasilitas pendidikan lebih baik, program-program administrasi publik lebih mudah diakses dan lebih efektif. Sementara itu, di daerah pedesaan, masih ada tantangan dalam akses informasi dan keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitas program-program tersebut.

1.2. Program Edukasi Hukum dan Penyuluhan Hukum

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa program edukasi hukum yang difokuskan pada pendidikan dasar hukum bagi masyarakat secara langsung mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum. Misalnya, di beberapa daerah, program yang melibatkan lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban hukum masyarakat berhasil mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, keterbatasan dalam pendanaan dan sumber daya manusia menjadi kendala dalam memperluas jangkauan program ini ke seluruh lapisan masyarakat.

1.3. Transparansi dalam Pelayanan Publik

Transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik adalah faktor yang berpengaruh dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi publik dan, pada gilirannya, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa pelayanan publik yang transparan di beberapa instansi pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.



Namun, di daerah dengan sumber daya yang terbatas, masih terdapat ketidakjelasan dalam prosedur administratif yang mengurangi efektivitas kebijakan yang ada.

1.4. Pengaruh Kebijakan Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Di daerah yang memiliki program lokal yang berbasis pada konteks sosial dan budaya masyarakat, tingkat kepatuhan hukum cenderung lebih tinggi. Masyarakat merasa kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan lebih mudah diterima karena disesuaikan dengan kondisi lokal mereka.

2. Pembahasan

2.1. Pentingnya Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum

Temuan ini sejalan dengan pendapat Tyler yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan ini adalah melalui pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, serta program-program pendidikan hukum yang efektif. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa administrasi publik yang dapat memberikan pelayanan yang transparan dan edukatif berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum, karena masyarakat merasa dihargai dan dipahami oleh pemerintah.

Namun, temuan ini juga menunjukkan adanya ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini sesuai dengan temuan yang dijelaskan oleh Jones yang menyatakan bahwa akses terhadap layanan publik yang berkualitas berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Di daerah perkotaan, akses terhadap informasi dan fasilitas pendidikan lebih mudah, sementara di daerah pedesaan, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menjadi kendala utama.

2.2. Program Penyuluhan Hukum sebagai Pendekatan Preventif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang dilakukan oleh administrasi publik, seperti melalui program penyuluhan hukum, memiliki dampak yang besar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan preventif ini juga sejalan dengan teori Lawson yang mengemukakan bahwa edukasi hukum di masyarakat akan mengurangi potensi pelanggaran hukum, karena masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang cukup akan lebih cenderung mematuhi aturan.

Namun, tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk mengembangkan program penyuluhan yang lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperluas akses dan efektivitas program penyuluhan hukum ini.

2.3. Pengaruh Transparansi Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Hukum

Seperti yang dinyatakan oleh Van Klink dan de Lange transparansi dalam administrasi publik berperan besar dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa daerah-daerah yang memiliki pelayanan publik yang lebih transparan, seperti proses pembuatan keputusan yang terbuka dan akses informasi yang mudah, cenderung memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa administrasi publik perlu lebih mengutamakan transparansi dalam prosedur administratif, sehingga masyarakat merasa lebih percaya pada sistem hukum yang diterapkan.

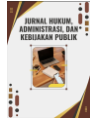
Namun, di daerah dengan sumber daya terbatas, ditemukan adanya ketidakjelasan dalam prosedur administratif yang mengarah pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas administrasi publik, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

2.4. Kebijakan Daerah dan Kepatuhan Hukum

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh besar dari kebijakan daerah terhadap tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Mardiasmo yang menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah yang berbasis pada konteks sosial dan budaya lokal lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan hukum. Masyarakat lebih cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap relevan dan adil.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan secara top-down dari pusat sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga perlu ada penyesuaian kebijakan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi kebijakan dan pemberdayaan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menciptakan kepatuhan hukum.

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum sangat penting, terutama melalui pendekatan preventif seperti penyuluhan hukum, transparansi pelayanan publik, dan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan lokal. Administrasi publik perlu lebih mengedepankan edukasi hukum, transparansi, dan akses informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selain itu, kebijakan yang berbasis pada konteks lokal juga sangat berpengaruh dalam menciptakan kepatuhan hukum yang lebih baik di masyarakat.



KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen kebijakan, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum
Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Peran ini bukan hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan preventif yang mencakup penyuluhan hukum, pendidikan hukum, serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh administrasi publik di beberapa daerah terbukti dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum.
2. Ketimpangan dalam Pelaksanaan Program di Perkotaan dan Pedesaan
Meskipun administrasi publik di daerah perkotaan cenderung lebih efektif dalam menerapkan program-program penyuluhan hukum dan transparansi pelayanan, daerah pedesaan menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan sumber daya dan akses informasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam tingkat kepatuhan hukum antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan.
3. Pentingnya Transparansi dalam Pelayanan Publik
Transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik terbukti berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Di daerah yang menerapkan pelayanan publik yang lebih terbuka dan mudah diakses, tingkat kepatuhan hukum lebih tinggi. Sebaliknya, di daerah yang tidak transparan, terdapat ketidakpuasan masyarakat yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum.
4. Efektivitas Kebijakan Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum
Kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah, yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang top-down seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, dan oleh karena itu desentralisasi kebijakan sangat penting dalam menciptakan kepatuhan hukum yang lebih baik.

2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat:

1. Perluasan Program Penyuluhan Hukum di Daerah Pedesaan
Untuk mengatasi ketimpangan akses informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, perlu ada upaya untuk memperluas program-program penyuluhan hukum di daerah pedesaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal untuk menyampaikan pentingnya kepatuhan hukum dan mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
Administrasi publik perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi adalah dengan menerapkan sistem informasi yang terbuka mengenai kebijakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan mengenai hak dan kewajiban mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran administrasi publik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat sangat krusial, terutama melalui pendekatan preventif dan edukatif. Kebijakan yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan konteks lokal lebih efektif dalam membangun budaya hukum yang positif dan meningkatkan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam menjaga ketertiban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fitzgerald, D. (2024). *Public Administration and Law: The Role of Law in Effective Public Governance*. Springer.
- [2] Tyler, T. R. (2020). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- [3] Jones, G. (2020). *Public Administration and Policy Analysis: The Role of Law in Public Policy Development*. Routledge.
- [4] Mardiasmo, D. (2022). *Good Governance and Education in Indonesia: A Legal Perspective*. Gadjah Mada University Press.
- [5] Suryadi, F. (2020). *Pendidikan dan Kebijakan Hukum: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. *Journal of Education and Law*, 45(1), 14-29.
- [6] Muluk, M. (2021). *Social Justice in Education: Legal Frameworks and Implementation in Developing Countries*. *Journal of Educational Policy and Law*, 28(4), 77-92.
- [7] Lawson, M. (2020). *Governance, Education, and the Law: Legal Dimensions of the Right to Education*. Harvard University Press.



- [8] Van Klink, B., & de Lange, M. (2021). *Law and Education: The Influence of Legal Frameworks on Public Education Policies*. Oxford Journal of Law and Public Policy, 30(3), 205-223.
- [9] Hood, C. (2020). *The Politics of Public Service Bargains*. Oxford University Press.
- [10] Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- [11] Smith, R., & Anderson, K. (2023). "The Role of Public Administration in Legal Awareness Campaigns: Enhancing Compliance through Education." *Journal of Public Policy and Administration*, 19(2), 56-70.
- [12] Williams, L., & Carter, M. (2024). "Public Administration's Role in Building Trust: Enhancing Legal Compliance through Transparency." *Journal of Governance and Public Integrity*, 27(3), 112-126.
- [13] Barnes, J., & Davis, P. (2023). "Preventive Approaches in Public Administration: Using Education and Advocacy to Improve Legal Compliance." *Public Administration Review*, 84(1), 75-89.
- [14] Lee, S., & Kim, J. (2025). "The Influence of Local Government Policies on Legal Compliance in Rural Communities." *Journal of Local Government and Law*, 22(4), 98-110.
- [15] Thompson, E., & Green, D. (2024). "Legal Education in Public Administration: A Path to Strengthening the Rule of Law in Communities." *Journal of Legal Studies and Public Administration*, 15(2), 140-154.